

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm.  
TENTANG PERMOHONAN ITS BAT NIKAH**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**F A T I M A H**

**NIM : 2103041**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H  
Tugurejo A. 3 Rt. 02 / Rw. 01  
Tugu Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. F a t i m a h

**Kepada Yth.**  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : F a t i m a h  
NIM : 2103041  
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA SEMARANG NOMOR 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm.  
TENTANG PERMOHONAN ITS BAT NIKAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqosahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaeman, MH  
NIP. 150 264 348

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum  
NIP. 150 279 720



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "WALISONGO"  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Atas nama : F a t i m a h

NIM : 2103041

Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA SEMARANG NOMOR 0007/Pdt.P/2006PA.Sm  
TENTANG PERMOHONAN ITS BAT NIKAH**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (SI) tahun akademik 2008 / 2009

**Ketua Sidang**

Semarang, 6 Agustus 2008

**Sekretaris Sidang**

Drs.H.A Ghozali  
NIP. 150 261 992

Drs. H. Eman Sulaeman, MH  
NIP. 150 254 348

**Penguji I**

**Penguji II**

Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.  
NIP. 150 254 254

Hj. Rr. Sugiharti, SH, M.H  
NIP. 150 104 180

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Drs. H. Eman Sulaeman, MH  
NIP. 150 254 348

Moh Arifin, S.Ag. M. Hum  
NIP. 150 279 750



## MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya : *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah ... (QS. Ali –Imran : 110)\**

---

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahananya, Bandung: CV. Penerbit Jumanatyl Ali-Art (J-Art), 2004. \*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, Skripsi yang amat sederhana ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibuku tercinta, beribu-ribu terima kasih atas semua kasih dan sayangmu yang selalu menasehati, memotifasi, mengarahkan dan mendoakan dengan begitu tulus ikhlas, sehingga penulis tahu banyak tentang arti kehidupan dan penulis mampu menyelesaikan tugas akhir belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang ini.
2. Untuk kakakku Taufiq, terima kasih atas segala perhatian, motifasi, dan do'a untuk menjadi yang lebih baik.
3. Untuk adik-adikku tersayang, Isma, Husen, Dilah dan A'am. Terima kasih atas do'a kalian yang tulus. Kalian harus semangat belajar dan menjadi yang lebih baik.
4. Kepada Bapak Drs. Eman Sulaeman, MH, selaku pembimbing I Penulis. Terima kasih atas segala bimbingan dan pengarahannya selama ini, juga Bapak Moh. Arifin, S.Ag M.Hum, selaku pembimbing 2 Penulis. Terima kasih banyak atas segala pengarahan, kritik, saran dan juga bantuannya yang telah diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
5. Untuk sahabatku Vina yang lebih dari seorang sahabat, walau jarak dan waktu yang memisahkan kita, namun kau tetap memberikan nasehat, motivasi, dan perhatian yang kau berikan membukakan hatiku untuk mengerti apa arti

seorang sahabat yang sebenarnya. Salut buat kamu neng, jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik ya.

6. Untuk sahabatku Zuhroh di Demak, kau sosok yang langka, kerendahan hatimu, kemandirianmu, kejujuranmu, benar-benar membuatku perlu belajar banyak darimu, tetep jadi diri kamu sendiri aja ya ? I Miss U.
7. Untuk Bapak H.M Sukendar sekeluarga, beribu-ribu terima kasih atas segalanya, semoga segala kebbaikannya mendapatkan balasan dari-Nya, dan mohon ma'af yang sebesar-besarnya segala salah yang di sengaja ataupun tidak.
8. Untuk saudara-saudarku Kos Iskandariyah tercinta, Tri.W, Tri. K, Ida, titik, Rina, Hany, Ratna, Nana, Ejo, Nany, Pipit, Yuni, Ane, Mbak Any, Olies, Ika, Dewi, H, Mbak Ema, Mbak Imut, Chotim dan semuanya. Ku benar-benar terharu dengan kabaikan-kebaikan kalian semua.  
Mbak Fat tidak akan pernah berhenti merindukan kalian semua.
9. Untuk Mbak Evi, Mbak Aini, Mbak Laili, Dian, Farida kalian adalah sahabat yang sangat baik yang aku temui.
10. Untuk sahabat-sahabatku angkatan'03 Syari'ah dan khususnya paket ASA '03 yang tidak mungkin kusebutkan satu persatunya, kalian semua temen seperjuan yang baik.  
Ku akan selalu menginat hari-hari kita yang pernah dilalui bersama.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2008

Deklarator,

**F a t i m a h**



## ABSTRAK

Adanya ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*" dan juga dalam pasal 5 ayat (1) KHI yang berbunyi "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*", maka setiap perkawinan diharuskan dicatatkan, sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi. Akta nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Akta nikah akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan jika terjadi permasalahan di kemudian hari, serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya.

Dalam putusan nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm, tentang permohonan Itsbat nikah. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menolak permohonan itsbat nikah para pemohon, majelis hakim menetapkan perkaranya hanya menitikberatkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, padahal dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur Itsbat nikah, namun Itsbat nikah diatur dalam pasal 7 KHI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para hakim yang disesuaikan dalam praktek perkara di Pengadilan Agama Semarang. Adapun pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif normatif.

Dalam pandangan penulis, jika dilihat dari berbagai faktor para pemohon berhak permohonan Itsbatnya dikabulkan. Dalam KHI sendiri juga mengatakan bahwa pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah atau belum sempat dicatatkan mempunyai peluang untuk di Itsbatkan di kemudian hari, jadi para pemohon berhak untuk dikabulkan permohonan Itsbatnya.

Kebijakan ini dalam Ushul Fiqh menggunakan metode *Maslahah mursalah*, yakni suatu ketentuan yang tidak diatur dalam agama (fiqh) namun tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Bahwasannya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan keculai untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka. Sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penyinar dunia dan pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam. Tidak ada kata yang pantas Penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-bearnya kepada :

1. Prof. DR. H. Abdul Djamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyidin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH, selaku Pembimbing I, dan bapak Muhammad Arifin, S.Ag. M.Hum, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis pada jenjang pendidikan sarjana ( S-1 )
5. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah, pegawai perpustakaan IAIN, perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Bapak Drs. Ali Imron, SH, selaku Hakim pembimbing di Pengadilan Agama Semarang yang telah meluangkan waktunya dengan tulus ikhlas kepada penulis selama proses penelitian ini.

7. Segenap staf pegawai di Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Keluarga penulis, Bapak, Ibu, kakak dan adik-adik penulis yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril dalam mengarungi lautan keilmuan ini.
9. Sahabat-sahabatku tercinta yang ikut memberikan do'a, motivasi, semangat serta palipur lara ketika dalam kegundahan, kelelahan selama studi terutama dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi, dan analisisnya. Karennya, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang 23 Juni 2007

Penulis

**F a t i m a h**  
**NIM. 2103041**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	7
D. Tela'ah Pustaka .....	7
E. Metode Penulisan Skripsi .....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	13

## BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG ITS BAT NIKAH, PENCATATAN PERKAWINAN, DAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN

A. KETENTUAN UMUM ITS BAT NIKAH .....	15
---------------------------------------	----

1. Pengertian Itsbat Nikah .....	15
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah .....	16
3. Syarat-syarat Itsbat Nikah .....	20
4. Akibat Hukum Itsbat Nikah. ....	22
<b>B. KETENTUAN UMUM PENCATATAN PERKAWINAN ...</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	24
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	24
3. Tata Cara Pencatatan Perkawinan .....	25
4. Tujuan Pencatatan Perkawinan .....	30
<b>C. KETENTUAN UMUM ASAS Keadilan,</b>	
<b>KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN .....</b>	<b>31</b>
1. Asas Keadilan .....	31
2. Asas Kepastian Hukum .....	35
3. Asas Kemanfa'atan .....	36
 <b>BAB III PENYELESAIAN PERKARA PERDATA NOMOR</b>	
<b>0007/Pdt.P/2006/PA.Sm DI PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>SEMARANG.</b>	
<b>A. Profil Pengadilan Agama Semarang .....</b>	<b>40</b>
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Semarang .....	40
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang .....	42
3. Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama .....	45
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang .....	46
<b>B. Putusan Pengadilan Agama Semarang</b>	

NOMOR 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. ....	47
1. Pihak-pihak yang Berperkara Dalam Itsbat Nikah .....	47
2. Landasan Pemohon Mengajukan Itsbat Nikah .....	48
3. Penyelesaian Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm .....	52
4. Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm .....	56
5. Amar Putusan NOMOR 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm .....	57
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm TENTANG DITOLAKNYA PERMOHONAN ITSBT NIKAH.</b>	
A. Analisis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm .....	59
B. Analisis Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm Relevansinya Terhadap Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran .....	82
C. Penutup .....	83

## **BIODATA MAHASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : F a t i m a h

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 14 Juli 1984

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Pododadi Rt. 01/Rw. 03 Karanganyar Pekalongan

Nama Orang Tua :

Bapak : S i s w o y o

Ibu : S u p r i h a t i n

Agama : Islam

Alamat : Pododadi Rt. 01/Rw. 03 Karanganyar Pekalongan

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Semarang, 23 Juni 2007

Penulis

**F a t i m a h**  
**NIM. 2103041**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Adapun perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya perkawinan itu diperintahkan atau dianjurkan oleh syariat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

---

<sup>1</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar Alishodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta, Graha Cipta, 2005, Cet.I, hlm.23.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Depag RI, 1999, hlm.33.



*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur : 32)<sup>3</sup>*

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan. Dinyatakan dalam hadits riwayat dari Abdullah Ibn Masy'ud, Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال النارسول الله صلى الله عليه وسلم:  
يامعشر الشلباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغضى للبعر واحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. (متفق عليه)

*Artinya : “Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata: Telah bersabda kepada kita ya Rasulullah SAW: Wahai generasi muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (mutafaq alaih).<sup>4</sup>*

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang sah, dan dalam ajaran Islam perkawinan ditradisikan sebagai sunnah

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004, hlm.61

<sup>4</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Lebanon : Dar al-Kutub Alamiyah, t.th., hlm.1019

Rasulullah, adapun perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan di syariatkannya perkawinan tercapai. Tercapainya ketenangan lahir dan batin sehingga timbul kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.

Peristiwa perkawinan itu sangat penting, sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian. Yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah dalam hukum Islam menggunakan metode *masalah mursalah*. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, namun kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.<sup>5</sup> Dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Atas dasar inilah, apabila seseorang ingin melakukan perkawinan, maka dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.6, 2003, hlm.121.

<sup>6</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bandung: Citra Umbara, 2002, hlm.2

tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-ghalid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, juga memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara sebenarnya ia mampu atau suami melanggar ketentuan ta’lik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal 7 kompilasi hukum Islam menegaskan pada ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi membuka kesempatan kepada

mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* (penetapan) kepada Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek fiqh saja tetapi aspek-aspek keperdataan juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Dengan melihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa masalah *itsbat nikah* tidak diatur dalam Undang-undang ini, tetapi mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi ketertiban dalam perkawinan. Tetapi KHI mengatur masalah *itsbat nikah* dalam pasal 7.

Kaitannya dengan putusan Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm tentang penolakan bagi pemohon *itsbat nikah* atas pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, dimana majelis hakim memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan diantaranya bahwa pemohon menikah setelah undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif dan pemohon melangsungkan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dalam pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 ayat (1) berbunyi, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan melihat putusan hakim yang menggunakan pertimbangan tersebut, bahwa permohonan *itsbat*

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.117.

*nikah* ditolak. Dalam KHI sendiri menyatakan bahwa pernikahan yang belum sempat dicatatkan pada badan yang berwenang, maka mempunyai peluang untuk *diistbatkan* yang tadinya belum dianggap sah secara hukum yang berlaku karena ada yang kurang syarat administrasinya.<sup>8</sup> *Itsbat nikah* atau penetapan nikah ke Pengadilan Agama sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga, sejalan dengan prinsip

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.*”<sup>9</sup>

Atas hal inilah penulis termotifasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “studi analisis terhadap putusan pengadilan agama semarang nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. tentang permohonan *itsbat nikah*”.

Skripsi ini akan menganalisa tentang penolakan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana perkara nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. di Pengadilan Agama Semarang.

## B. Pokok Permasalahan

Agar pembahasan skripsi ini dapat terfokuskan pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm.41.

<sup>9</sup> Moh Adib Bisri, *Terjemahan Al Fara Idul Bahiyyah*,, Kudus, Menara Kudus, 1977, hlm 24.

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. di Pengadilan Agama Semarang tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah* ?
2. Bagaimana relevansi putusan perkara nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. di Pengadilan Agama Semarang tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah* terhadap asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. di Pengadilan Agama Semarang tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah*.
2. Untuk mengetahui relevansi putusan perkara nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. di Pengadilan Agama Semarang tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah* terhadap asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah suatu hasil karya para ahli hukum baik berupa karya ilmiah, skripsi maupun tulisan-tulisan yang merupakan hasil penelitian. Adapun beberapa karya ilmiah atau tulisan-tulisan yang penulis jadikan telaah dalam skripsi ini yang tentunya menyinggung masalah *itsbat nikah* dan pencatatan nikah diantaranya adalah:

Moh. Arifin, S.Ag. M. Hum (Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang), dalam penelitiannya “*Itsbat nikah* Solusi Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan dalam Usaha Terciptanya Perlindungan Hukum” menyatakan demi tertibnya perkawinan dan kepastian hukum bagi para calon suami istri dan para pihak yang terkait dengan pencatatan nikah (PPN) bahwa pencatatan pernikahan merupakan keharusan, sehingga masyarakat perlu mengerti akan pentingnya pencatatan guna terciptanya perlindungan hukum.<sup>10</sup>

Lembaga penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat, IAIN Walisongo Semarang, dalam penelitian “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Kalangan Masyarakat Islam Kabupaten Jepara” menyatakan bahwa pencatatan setiap perkawinan sebenarnya adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, untuk mencatatkan kembali pernikahan mereka dalam buku register perlu dilakukan *itsbat nikah*.<sup>11</sup>

Tim peneliti, pusat penelitian dan pengabdian masyarakat, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam penelitiannya “Studi Kasus Kawin Sirri dan Poligami Di Kecamatan Rembang” dalam penelitiannya menyatakan bahwa kawin sirri atau pernikahan yang tidak dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah, akan membawa dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Bagi pihak istri, pelaksanaan kawin sirri di Rembang mampu meningkatkan taraf

---

<sup>10</sup> Moh Arifin, *Itsbat nikah Solusi Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan dl Usaha Terciptanya Perlindungan Hukum*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2006.

<sup>11</sup> Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat IAIN Walisongo, *Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan di Kalangan Masyarakat Islam Kabupaten Jepara*, Semarang: IAIN Walisongo, 1982.

kehidupan yang lebih baik dari segi perlindungan dari godaan laki-laki lain maupun penghasilan perbulannya bisa tercukupi, dan juga memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan. Dampak negatif kawin sirri yang terjadi di Kecamatan Rembang, praktek kawin sirri semacam ini akhirnya dapat mendidik suami istri untuk bersikap tidak terbuka, tidak jujur dan akhirnya bermuara menjadi orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Muntaha dalam skripsinya “Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Mijen Kota Semarang)” mengungkapkan tentang efektifitas pelaksanaan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu tidak mencatatkan perkawinannya karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan yang lebih menekankan perspektif fiqh sentris.

Edi Kusnadi dalam skripsinya, “Analisis Hukum Acara terhadap Putusan PA Semarang No. 969/pdt.G/PA.SM. tentang *Itsbat nikah* Sekaligus Cerai Gugat” ini, disamping tidak memenuhi syarat penggabungan yang tidak diperbolehkan, juga keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat *itsbat nikah* dilakukan adalah dalam rangka penyelesaian perceraian. Tanpa adanya pengesahan nikah, maka perceraian tidak dapat dilaksanakan. Karena hubungan yang sangat erat ini, maka keduanya dapat digabungkan walau berbeda, penggabungan ini justru merupakan kreatifitas majelis hakim dalam

---

<sup>12</sup> Tim Peneliti, “Studi Kasus Kawin Sirri dan Poligami di kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1994



mengemukakan pemecahan baru terhadap permasalahan yang dihadapinya yang dikenal sebagai menghaluskan hukum.

Ulil Abshor dalam skripsinya “efektifitas pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, menyatakan prkawinan yang terjadi diwilayah Kecamatan Klambu pada tahun 2005 sebanyak 367 pasangan yang resmi tercatat pada kantor KUA, namun selain itu juga masih terdapat sekitar 36 pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya pada kantor KUA dengan berbagai alasan diantaranya adalah karena faktor ekonomi, pendidikan dan pengetahuan keagamaan, namun ditemukan beberapa orang tidak mencatatkan perkawinan, tetapi berdasarkan hasil temuan penulis keberadaan pasal 2 ayat 2 UU perkawinan No. 1 tahun 1974 telah berlaku secara efektif dan memberi dampak yang positif bagi masyarakat kecamatan Klambu.

Dari beberapa uraian telaah pustaka di atas digunakan untuk membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang sejenis sehingga menghindarkan dari adanya duplikasi. Karena itulah penelitian ini akan menjelaskan beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh keterangan di atas, sehingga dari sini akan dapat diharapkan suatu penjelasan yang lebih global, argumentatif dan obyektif.

## E. Metode Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah sebagai jaminan dalam penulisan guna pembahasan skripsi. Sedangkan metode yang akan digunakan adalah:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,<sup>13</sup> yang meliputi penelitian terhadap studi dokumen, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para hakim yang disesuaikan dalam praktek perkara di pengadilan agama Semarang, mengenai ditolaknya permohonan *itsbat nikah*.

### 2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>14</sup> Sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara. Dalam hal ini sebagai sumber data primernya yaitu data yang diperoleh dari pendapat hakim tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah*. Dan sekundernya diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip

---

<sup>13</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Soaial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm, 92.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosdur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, cet XII, 2002, hlm 107.

resmi, sebagai sumber data sekundernya diperoleh dari literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah data lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti atau penelitian yang dilakukan dalam kancah untuk mendapatkan data yang riil. Adapun sumber data tersebut penulis peroleh melalui:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup> Wawancara ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Semarang dengan responden yang terdiri dari para hakim.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, prasasti, agenda, dan putusan hakim.<sup>17</sup> Dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas perkara nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm. yaitu tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah*.

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta : Offset, 2000, hlm.66

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet ke IV, 2004, hlm 95

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 135.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif normatif. Metode deskriptif normatif yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan norma-norma yang menjadi dasar para hakim dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara di pengadilan.<sup>18</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini hal yang sangat penting, karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berurutan. Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara keseluruhan. Penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### Bab I PENDAHULUAN

Yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara keseluruhan.

##### Bab II KETENTUAN UMUM TENTANG *ITSBAT NIKAH*, PENCATATAN PERKAWINAN, DAN ASAS Keadilan, KEPASTIAN HUKUM & KEMANFAATAN

---

<sup>18</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1989, hlm.68-69.

Dalam bab ini menerangkan secara jelas tentang ketentuan umum *itsbat nikah*, pencatatan perkawinan dan asas keadilan, kepastian hukum kemanfaatan.

Bab III    PENYELESAIAN       PERKARA       PERDATA       NOMOR  
0007/Pdt.P/2006/PA.Sm.    DI    PENGADILAN    AGAMA  
SEMARANG

Dalam bab ini menerangkan profil Pengadilan Agama Semarang, dan isi putusan pengadilan agama Semarang Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm.

Bab IV    ANALISIS       TERHADAP       PERKARA       NOMOR  
0007/Pdt.P/2006/PA.Sm.    TENTANG PERMOHONAN *ITSBAT*  
*NIKAH*

Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm dan relevansi putusan perkara nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah* terhadap asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Bab V    PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG PERKARA *ITSBAT NIKAH*, PENCATATAN PERKAWINAN, DAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM & KEMANFAATAN

#### A. Ketentuan Umum *Itsbat nikah*

##### 1. Pengertian *Itsbat nikah*

*Itsbat* mempunyai arti penetapan, penyungguhan, penentuan, mengitsbatkan artinya menyungguhnya, menemukan, menetapkan (kebenaran sesuatu)<sup>1</sup> sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa adalah artinya “bersenggama atau bercampur”.<sup>2</sup> Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.<sup>3</sup> Sedangkan nikah menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Jadi pada dasarnya *itsbat nikah* adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. 3, hlm. 339.

<sup>2</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2002), hlm. 2.

terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

*Itsbat* (penetapan) merupakan perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. perkara *voluntair* yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti: <sup>5</sup>

- Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
- Penetapan pengangkatan wali
- Penetapan pengangkatan anak
- Penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*)
- Penetapan wali *adhol*, dan sebagainya.

Produk perkara *voluntair* ialah penetapan. Nomor perkara permohonan diberi tanda P, misalnya: Nomor 125/pdt.p/1996/PA.BH.<sup>6</sup> Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka dicantum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan bersifat menyatakan (*declaratoire*).

## 2. Dasar Hukum *Itsbat nikah*

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, di samping ada ketentuan perundang-undangan yang

---

<sup>5</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 41.

<sup>6</sup> *Ibid.*

mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang *itsbat nikah* seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) kompilasi hukum Islam yang berbunyi: *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*. Dan ayat (3) berbunyi: *itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaiannya perkawinan.*
- b. *Hilangnya akta nikah.*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.*
- d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*<sup>7</sup>

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan *itsbat nikah* seperti diatur dalam pasal 7 tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) kompilasi hukum

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000), hlm. 137.



Islam tersebut, nikah itu dapat dicatatkan dan di*itsbatkan* alias diakui secara administratif. Ini pada satu sisi, dan pada sisi yang lain, dengan adanya pasal 7 tersebut, berarti telah memberikan peluang bagi nikah-nikah yang tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.<sup>9</sup>

Dalam hal pencatatan perkawinan, dalam al-Qur'an atau al-sunnah tidak dibicarakan secara langsung, namun dalam ayat Mudayanah (al-Baqarah, 2: 282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian,

---

<sup>8</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 38.

<sup>9</sup> A. Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 148.

yang dalam perkawinan, menjadi salah satu rukun.<sup>10</sup> Lebih jelasnya akan dikutip ayat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur (QS. Al-Baqarah: 282).*<sup>11</sup>

Dalam hal bermu'amalah saja Allah memerintahkan untuk mencatatkannya, apalagi peristiwa perkawinan yang begitu penting, bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dengan melihat pertimbangan kemaslahatan. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahat mursalah* yang menurut al-Syatiby merupakan dalil qat'i yang dibangun atas dasar kajian

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. VI, hlm. 118.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Al-Jumanatul Ali Art (J-ART), 2004), hlm. 59.

induktif (*istiqrā'i*) dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan, khususnya keluarga.

### 3. Syarat-syarat *Itsbat nikah*

Tentang syarat *itsbat nikah* ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat *itsbat nikah* ini karena dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena *itsbat nikah* (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam, bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu pegawai pencatat nikah (PPN). Syarat dan rukun nikah antara lain:<sup>12</sup>

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak dapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya adalah:
  - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 71.

- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud aqad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa atau baligh.
- e. Ijab qabul

Rukun yang pokok dalam perkawinan yaitu ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga.<sup>13</sup> Karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada pelambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Pelambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri disebut ijab, dan

---

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib, *Fiqih Sunah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hlm. 48.

pernyataan yang keduanya dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut qabul.<sup>14</sup> Syarat-syaratnya ijab qabul antara lain:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah, tazwij.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

#### 4. Akibat Hukum *Itsbat nikah*

Pernikahan yang tidak terdaftar atau tercatat pada catatan sipil atau pegawai pencatat perkawinan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti tertulis resmi yang bisa diakui oleh pihak-pihak yang terkait. Sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat (1): *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.*

Dengan demikian pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

sebagaimana tertuang dalam kompilasi hukum Islam pasal 6 ayat (2) *perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Pernikahan yang tidak dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah tetap dianggap sah, apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama (Islam). Dengan adanya *itsbat nikah* (penetapan nikah) ke Pengadilan Agama maka pernikahan yang tidak atau belum tercatatkan akan mempunyai kekuatan hukum apabila dihadapkan pada institusi-institusi yang ada, karena memiliki bukti otentik.

*Itsbat nikah* (penetapan nikah) selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, juga memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, seperti halnya suami melalaikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara ia sebenarnya mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat terselesaikan dengan adil.

Dengan adanya *itsbat nikah*, problem-problem dapat terselesaikan dengan landasan hukum yang kuat, namun pada sisi yang lain akibat hukum *itsbat nikah* yaitu masyarakat akan halnya pencatatan nikah kurang menyadari pentingnya kekuatan bukti otentik pernikahan. Karena masyarakat beranggapan segalanya bisa terselesaikan secara mudah dengan mengajukan *itsbat nikah*, apabila selang waktu pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang otentik.

## B. Ketentuan Umum Pencatatan Perkawinan

### 1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan, pengertian perkawinan dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.<sup>15</sup> Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke dalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

### 2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*.<sup>16</sup> Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

*(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 935.

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

- (2) *Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1975.*<sup>17</sup>

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

- (1) *Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pencatat nikah.*
- (2) *Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan adalah merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai masalah mursalah dalam kehidupan berumah tangga.

### 3. Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan didahului kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pegawai pencatat nikah. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah, selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang. Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka

---

<sup>17</sup> Pasal 5 KHI.



keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau yang mewakilinya.<sup>18</sup> Bila pemberitahuan itu dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin maka proses ini dapat diteruskan.

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2 berbunyi: *bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, sedang bagi mereka yang tidak beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan.*

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh dua instansi, yaitu:

- a. Pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.
- b. Kantor catatan sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.

Tentang cara melakukannya pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 3 sampai dengan 9 dan juga pasal 2 peraturan pelaksanaan yang meliputi tahap-tahapnya antara lain:

- a. Pemberitahuan

Yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai

---

<sup>18</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IND-HILL, CO, 1985), hlm. 163.

pencatat perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5.

Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh seseorang atau calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali atau diwakilkan kepada orang lain. Pemberitahuan secara tertulis jika dapat dilakukan jika ada pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. Dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh orang lain yang tersebut harus ditunjuk dengan suatu surat kuasa khusus.

Pemberitahuan harus sudah disampaikan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan, dan di dalamnya juga harus dinyatakan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan tempat kediaman kedua calon mempelai.

b. Penelitian

Setelah pegawai pencatat perkawinan menerima pemberitahuan seperti diuraikan di atas, ia harus mengadakan penelitian terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu juga harus diteliti tentang hal-hal seperti yang disebutkan oleh pasal 6 Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya setelah diadakan penelitian yang sebaik-baiknya, dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak menerima saja yang ditemukan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu, tetapi pegawai pencatat

perkawinan juga menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk melakukan pencatatan. Dalam hal terdapat suatu halangan atau belum dipenuhinya syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan harus segera memberitahukan hal itu kepada pihak yang bersangkutan.

c. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk melakukan perkawinan yang meyakinkan, maka pegawai pencatat perkawinan mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Pegawai pencatat perkawinan menempelkan surat pengumuman yang telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah wilayahnya meliputi wilayah tempat perkawinan itu dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai di tempat yang telah ditentukan sehingga mudah dibaca oleh masyarakat umum.

Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan selain memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat waktu dan tempat perkawinan itu akan dilangsungkan.

Adapun maksud perkawinan itu seperti diterangkan dalam pasal 8, adalah memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui

dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila perkawinan itu diketahui bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaan orang yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Saat Pencatatan

Menurut pasal 2 bahwa *perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat perkawinan dan khusus untuk yang beragama Islam, juga ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya.*

Penandatanganan itu dilaksanakan sesudah dilangsungkannya upacara pernikahan yakni setelah diucapkannya akad nikah bagi yang beragama Islam.

Akta perkawinan itu oleh pegawai pencatat perkawinan dibuat rangkap 2, helai pertama disimpan di kantor pencatatan (KUA atau KCS), sedangkan helai kedua dikirim ke pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi kantor pencatatan nikah tersebut (pasal 13 PP No. 9 tahun 1975).

Kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta nikah yang mirip dengan buku nikah sebagai bukti otentik bagi masing-masing suami istri.

#### 4. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>19</sup>

Bahwa tujuan pencatatan perkawinan itu tiada lain semata-mata untuk kepentingan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan situasi pada waktu Rancangan Undang-Undang Perkawinan ini dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Banyak anggota Dewan yang keberatan untuk memuat keharusan pencatatan perkawinan dengan alasan takut sahnya perkawinan itu ditentukan oleh pencatatan tersebut.<sup>20</sup>

Sementara itu dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*. Dengan demikian dapat

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 107.

<sup>20</sup> Mohammad Hasan Bisyr, "Problematika Nikah Sirri Dalam Negara Hukum", Dalam Jurnal Hukum Islam, Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan No. 1 Tahun 2004, hlm. 71.

disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah tetap dianggap sah, apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama (Islam), sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang perkawinan. Meskipun demikian pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dihadapkan pada institusi yang ada. Karena tidak memiliki bukti otentik, berupa akta nikah atau kutipannya, KHI Pasal 6 ayat (1).<sup>21</sup>

### **C. Ketentuan Umum Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan**

#### **1. Asas Keadilan**

Asas mempunyai arti pokok, dasar, prinsip, pondamen.<sup>22</sup> Sedangkan keadilan berasal dari kata adil, yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran.<sup>23</sup> Kata keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Jadi pada dasarnya asas keadilan adalah prinsip yang adil.

Asas keadilan merupakan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang wajib dilakukan oleh para penegak keadilan, sebagaimana ketentuan asas keadilan itu didasarkan pada al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Pius A. Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 48.

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. 3, hlm. 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: 135).

Artinya: *Hari orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa': 135).*<sup>24</sup>

Menegakkan keadilan itu adalah prinsip, walaupun ada tekanan dari manapun dan dalam kondisi bagaimanapun keadilan itu harus ditegakkan. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum peranan badan-badan peradilan dan hakim adalah penting. Ciri-ciri negara hukum tergambar dengan jelas pada prinsip-prinsip:

- a. Persamaan di dalam dan di bawah hukum.
- b. Semua warga negara diadili oleh badan peradilan yang sama.
- c. Orang tak bisa disalahkan kecuali atas dasar aturan hukum yang telah ada.
- d. Semua aturan hukum tercantum dalam kaidah hukum tertentu (tertulis atau tidak tertulis).
- e. Negara dan warganya tunduk pada aturan hukum yang sama (*supremacy of law*).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 101.

<sup>25</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: IND-HILL, CO, 1991), hlm. 152.

*Rule of law* berinti meletakkan hubungan antara hukum dan keadilan (Inggris), atau perlindungan kepada hak-hak asasi manusia (Amerika) atau di negeri Belanda berarti perjuangan dari paham kedaulatan hukum (*Krabbe*) terhadap kedaulatan negara.<sup>26</sup> Dengan kesimpulan bahwa hendaknya hukum benar-benar merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, pemerintahanpun harus tunduk kepada hukum. Untuk menjamin kaidah ini, kekuasaan para hakim sangat besar, termasuk tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan tugas kekuasaan pemerintah dan perlindungan terhadap warga negara sebagai subjek hukum yang mempunyai hak asasi dan kewajiban asasi.

Dalam praktek, prinsip-prinsip *rule of law* lebih banyak tergambar dalam cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan para hakim dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi. Kebebasan hakim dapat mempunyai arti ganda, positif bermanfaat dan negatif merusak nilai-nilai hukum dan keadilan. Kebebasan hakim akan positif bermanfaat apabila jabatan hakim tersebut dipegang oleh manusia yang baik kepribadiannya.

Kepribadian hakim banyak ditentukan oleh pendidikannya, akhlak budinya, dan kesadaran akan kewajiban sebagai hakim. Pengangkatan hakim tidak dapat dilakukan sembarang orang, tetapi harus mempunyai syarat-syarat yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada permulaan pemerintahan Islam, seseorang diangkat menjadi hakim diperlukan syarat-syarat, antara lain:

- a. Laki-laki yang merdeka

---

<sup>26</sup> *Ibid.*



- b. Berakal (mempunyai kecerdasan)
- c. Beragama Islam
- d. Adil
- e. Mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya.
- f. Sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.<sup>27</sup>

Pada saat itu, pengangkatan hakim apakah mesti laki-laki atau perempuan, sudah menjadi perdebatan antara para ulama. Sebagian mengharamkan dan sebagian lain membolehkan seorang wanita menjadi hakim. Apalagi seseorang dimana bias gender sedang dipersoalkan, maka siapapun boleh menjadi hakim sepanjang mempunyai kualifikasi yang memadai, seperti kepribadian yang jujur, cerdas, amanah dan berilmu di bidangnya.

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai dan teratur. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya mengatur pergaulan hidup jika ia menuju peraturan yang adil, terdapat keseimbangan antara kepentingan. Kepentingan yang dilindungi. Hal ini bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Menurut Aristoteles “*ius suum cuique tribuere*” bahwa keadilan tidak dipandang sama dengan persamaan. Menurut Aristoteles ada dua teori keadilan yaitu:

- a. Keadilan distributif

Keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang menurut jasanya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

b. Keadilan commutatif

Keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

Keadilan *apeldoorn*, melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri.

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata pasti yang mempunyai arti sudah tetap, tentu, mesti.<sup>28</sup> Sedangkan kepastian mempunyai arti perihal (keadaan) pasti, ketentuan, ketetapan. Jadi pada dasarnya kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>29</sup>

Ketentuan asas kepastian hukum, didasarkan pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
(البقرة: 178).

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas*

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus, *op. cit.*, hlm. 835.

<sup>29</sup> *Ibid.*

*sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih* (QS. Al-Baqarah: 178).<sup>30</sup>

Hukum Islam tidak mengharuskan, yang boleh tampil di depan pengadilan adalah para ahli hukum saja. Hukum Islam menghendaki, tiap manusia muslim, laki-laki ataupun wanita, berhak dan mampu berbuat hukum dan mampu berperkara di depan pengadilan untuk membela hak-haknya dan memperjuangkan kebenaran. Dalam hubungannya dengan organisasi masyarakat (negara), hakim berkewajiban menegakkan hukum negara untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Masyarakat sangat memerlukan kepastian hukum dan jaminan hukum atas hak-haknya. Seluruh peraturan hukum yang ada hubungannya dengan kewenangan absolut pengadilan membatasi ruang geraknya. Misi dan tujuan bernegara harus diusahakan menjadi misi pribadinya sebagai hakim.<sup>32</sup>

### 3. Asas Kemanfaatan

Kemanfaatan berasal dari kata manfaat, yang mempunyai arti guna, faedah.<sup>33</sup> Sedangkan kemanfaatan mempunyai arti hal (ber) manfaat, kegunaan.

Asas kemanfaatan dalam hal ini adalah kemanfaatan, kegunaan hukum. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara. Dia adalah milik negara dan bangsa Indonesia. Bukan milik swasta atau milik golongan tertentu. Setiap lingkungan peradilan yang dilimpahi fungsi dan

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>31</sup> M. Idris Romulyo, *op. cit.*, hlm. 156.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kamus, *op. cit.*, hlm. 710.

kewenangan menyelenggarakan peradilan adalah lembaga “kekuasaan negara” dan sekaligus milik negara dan seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun lingkungan peradilan agama didasarkan atas asas personalita keislaman, tidak berarti milik swasta dan kelompok yang beragama Islam, namun milik negara dan rakyat Indonesia serta sekaligus berkedudukan sebagai alat kekuasaan negara yang bisa mendatangkan kemanfaatan.

Asas manfaat timbul karena kemaslahatan umum<sup>34</sup> jika kemaslahatan itu khashash, hal itu gugur karena kemaslahatannya sendiri harus didahulukan. Tetapi jika kemaslahatannya itu ammah, maka wajib atas orang yang berpautan kemaslahatan itu dengan mereka mengerjakan atau menyelesaikan kemaslahatannya itu secara tidak merusakkan pokok kemaslahatan mereka dan tidak menjerumuskan mereka ke dalam mafsadat.<sup>35</sup>

Ketentuan asas kemanfaatan didasarkan pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 135. Dalam menegakkan keadilan hakim jangan terpengaruh walaupun karena tekanan dari pihak lain. Di dalam pengadilan negara sudah dipermasalahkan terlebih dahulu. Permasalahan yang dihadapi umat Islam di berbagai tempat bersifat kasuistik, artinya tidak semua persoalan yang dihadapi umat Islam di suatu tempat sama dengan permasalahan umat Islam di tempat lain. Agar suatu keputusan hakim bisa memenuhi unsur kemanfaatan, maka perlu adanya suatu ijtihad yang benar-benar bisa mendatangkan kemaslahatan.

---

<sup>34</sup> M. Idris Romulyo, *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>35</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet. 2, hlm. 255.

Menurut Yusuf Qardhawi, ijihad yang diperlukan pada zaman ini ada dua macam yaitu ijihad *intiqā'i* (selektif) dan ijihad *insyā'i* (kreatif).

a. Ijihad *Intiqā'i* (selektif)

Ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Sesungguhnya ijihad yang kita serukan ini, ialah kita mengadakan study komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannyapun sesuai dengan kaidah tarjih. Kaidah tarjih itu banyak diantaranya hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang. Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak mara bahaya dari mereka.

b. Ijihad *Insyā'i* (kreatif)

Ialah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh para ulama terdahulu, baik itu persoalan lama atau baru. Dengan kata lain, bahwa ijihad *insyā'i* adalah meliputi sebagian persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru

dalam masalah itu yang belum didapati dari pendapat ulama-ulama salaf dan yang demikian itu berkat karunia Allah.

Diantara macam ijihad kontemporer adalah ijihad gabungan antara ijihad *intiqā'i* (selektif) dengan ijihad *insyā'i* (kreatif), yaitu ijihad dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijihad baru.<sup>36</sup>

Asas kemanfaatan timbul karena mementingkan atau demi kemaslahatan umum. Jadi agar suatu putusan hakim mencapai upaya kemanfaatan hukum maka dari segala aspek benar-benar perlu dipertimbangkan demi terciptanya hukum yang bermanfaat dan tercapainya suatu keadilan hukum. Putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga unsur atau aspek sekaligus secara seimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijihad Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 24-25.

<sup>37</sup> A. Mukti Arto, *op. cit.*, hlm. 35.

**BAB III**

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA NOMOR 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm**

**DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

**A. Profil Pengadilan Agama Semarang**

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Semarang

Menurut dokumentasi Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Semarang sebelum terbentuknya Departemen Agama bernama *Priesteraad* atau *Road* Agama yang bertempat di sekitar Masjid Kauman Kota Semarang. Pengadilan agama tersebut sudah berdiri sejak penjajahan Belanda. Buktinya, ditemukan sebuah arsip tentang putusan bernomor 30 tahun 1891 yang menggunakan tulisan Jawa.<sup>1</sup>

Pada saat Sultan Agung berkuasa di Mataram (1613-1695) hukum Islam digunakan sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara, ketika Amangkurat 1 berkuasa menggantikan Sultan Agung (1645), maka peradilan perdata untuk mengurangi pengaruh ulama' dalam pengadilan dan raja menjadi pucuk pimpinannya.<sup>2</sup>

Pada tahun 1747 daerah Semarang jatuh ke tangan kompeni, dan hukum yang di pakai ialah undang-undang orang jawa dengan catatan dapat di terima oleh masyarakat. Pada saat itu yang berkuasa adalah Pakubuwono ke II, dan tahun 1750 telah di keluarkan *plakat* yang berisi

---

<sup>1</sup> Dokumentasi pengadilan agama Semarang

<sup>2</sup> *Ibid*

tentang pengambilalihan perkara-perkara yang dulu di adili oleh pengadilan *landraat*.<sup>3</sup>

Dengan demikian, maka *landraat* itu menggantikan kedudukan pengadilan perdata dulu, yang kemudian di zaman Sultan Agung di rubah menjadi Pengadilan Serambi. Pada pokoknya peraturan *plakat* itu adalah lanjutan dari pengadilan di Mataram, dengan pengertian bahwa *landraat* di Semarang menggantikan pengadilan Serambi Sepanjang mengenai daerah kekuasaan kompeni.<sup>4</sup>

Dilihat dari sepintas sejarah di atas, maka Pengadilan Agama Semarang sudah ada sejak sultan Agung berkuasa di Mataram dan bertempat di jalan Ronggolawe No. 6 Semarang Barat, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1978 sampai sekarang dan sudah terjadi pergantian ketua sampai Drs.H. Wakhidun AR.SH. M Hum.<sup>5</sup>

Susunan Peradilan Agama Semarang kelas 1A, tentang tugas dan wewenangnya serta susunan organisasi dan tata kerja atau sama dengan peradilan yang lain berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 11 tahun 1978, tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama di daerah tahun 1986/1987 dan di sempurnakan lagi dengan Keputusan Menteri Agama KMA/393/1990, dan Keputusan Mahkamah Agung KMA/003/SK/11/1992 untuk lebih jelasnya Pengadilan Agama Semarang bagan susunan pengadilannya terlampir.

---

<sup>3</sup> Mr. martiman prodjohamidjojo, *Tanya jawab undang-undang perkawinan*, Jakarta, PT Abadi, 2004, hlm 2

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Struktur organisasi pengadilan Agama Semarang



## 2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang sama dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang di jelaskan oleh undang-undang dan literatur pada umumnya.

### a. Tugas pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang di ajukan kepadanya.<sup>6</sup>

### b. Wewenang pengadilan agama Semarang

#### 1. Kekuasaan relatif

Kekuasaan terhadap wilayah hukum dalam arti bahwa kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat dalam perbedaannya dan kekuasaan pengadilan yang sama tingkatnya.<sup>7</sup> Yang berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada berdiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kompetensi relatif diatur dalam undang-undang yaitu pasal 4 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota kabupaten akan tetap dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) ini ada

---

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 1.

<sup>7</sup> Raikhan Rasyid Bisri, *Hukum Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 25.

pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten.<sup>8</sup>

Kompetensi relatif ini juga menyangkut tentang di mana seharusnya seseorang mengajukan suatu masalah atau perkara dan hasil wawancara penulis selaku hakim dengan pengadilan agama Semarang maka kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang meliputi wilayah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Gayamsari
- b. Kecamatan Candisari
- c. Kecamatan Gajah mungkur
- d. Kecamatan Pedurungan
- e. Kecamatan Tembalang
- f. Kecamatan Semarang Tengah
- g. Kecamatan Semarang Timur
- h. Kecamatan Semarang Selatan
- i. Kecamatan Semarang Barat
- j. Kecamatan Semarang Utara
- k. Kecamatan Genuk
- l. Kecamatan Gunung pati
- m. Kecamatan Mijen
- n. Kecamatan Tugu
- o. Kecamatan Ngaliyan<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 218-219.

## 2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan (kompetensi) absolut adalah kekuasaan yang mutlak yang berkenaan dengan jenis Perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan yang berhak atas suatu penyelesaian perkara dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, Pengadilan Agama Semarang berdasarkan pasal 49 UU No 3 tahun 2006. Yang mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang terhadap perkara; a.perkawinan, b.kewarisan, c.wakaf, d.shodaqoh, e.zakat, f. infaq, dan ekonomi syariah.<sup>11</sup>

Dalam hal ini Pengadilan Agama dalam menangani perkara semakin bertambah, dalam hal ini kalau terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputuskan dahulu oleh pengadilan lingkungan peradilan umum.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Imron, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 28 Februari 2008.

<sup>10</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, cet. ke-1, hlm. 152.

<sup>11</sup> Harjo, Hamdani, "Sambutan Hangat untuk UU No.3/2006" dalam *Justisia*, Edisi 30, Tahun XV 2006, hlm. 38.

<sup>12</sup> Undang-undang RI Tentang Peradilan, Citra Wacana, 2008, hlm 130.

### 3. Sumber-sumber Hukum acara Peradilan Agama

Hukum acara Peradilan Agama yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam setiap memutus dan menetapkan suatu perkara bersumber dari :

- a. HIR/R.Bg.
- b. UU no.3 th 2006 amandemen uu no.7 th 1989 tentang Peradilan Agama
- c. UU no 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- d. UU no 14 tahun 1985
- e. UU no 1 tahun 1974 jo. PP. no. 9 tahun 1975
- f. UU no. 20 tahun 1947
- g. Inpres no.1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)
- h. Peraturan Mahkamah Agung
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung
- j. Peraturan Menteri Agama
- k. Keputusan Menteri Agama
- l. Kitab-kitab fiqih Islam dan hukum tidak tertulis lainnya
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung<sup>13</sup>

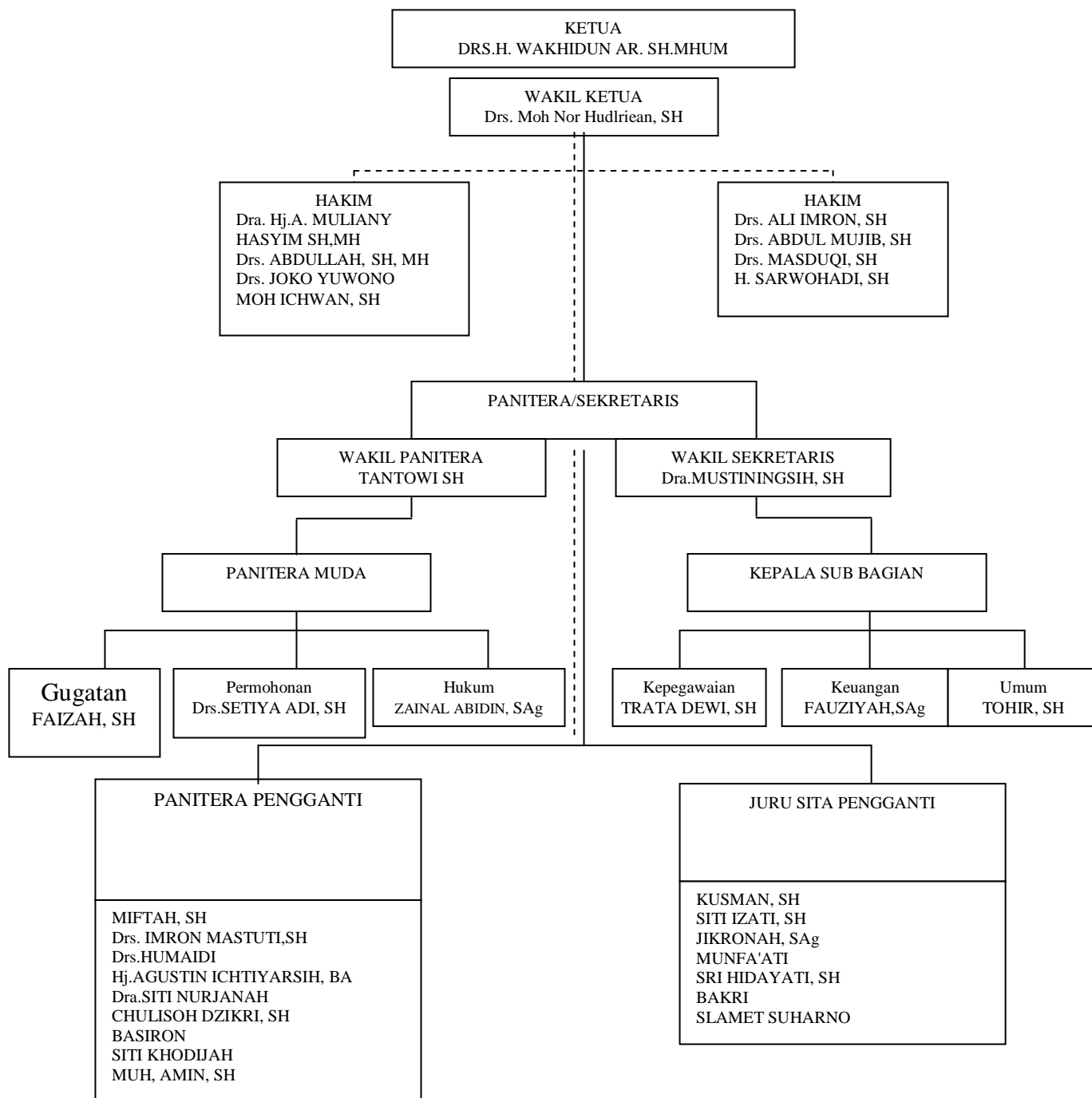
### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Semarang

Adapun struktur organisasi pengadilan agama Semarang berdasarkan No. KMA/004/SK/II/1992 adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Muktiarto, *op.cit* hlm 12

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2008



----- : Garis Komando

\_\_\_\_\_ : Garis Tanggung Jawab

## **B. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0007/pdt.p/2006/PA.SM**

### **1. Pihak-pihak yang berperkara dalam *itsbat nikah***

Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang yang telah memeriksa dan telah mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan dengan nomor perkara 0007/pdt.p/2006/PA.SM, yang mana kasus ini sebagai obyek penelitian bagi penulis.

Sebelum penulis mengetengahkan kasus tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah* yang tidak dicatatkan di KUA ini, maka untuk lebih jelasnya akan penulis kemukakan tentang kedudukan orang-orang yang berperkara.

Bahwa Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara *itsbat nikah* pada tingkat pertama telah memberi penetapan yang diajukan oleh:

SUWATNO bin KUSLAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, terakhir bertempat tinggal di Kedung Pane RT. 03 RW. II kelurahan Ngaliyan kecamatan Ngaliyan kota Semarang, sebagai PEMOHON I

SUMARIYAH binti PASIDI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, terakhir bertempat tinggal di Kedung Pane RT. 03 RW. II kelurahan Ngaliyan kecamatan Ngaliyan kota Semarang, sebagai PEMOHON II<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 0007/pdt.p/2006/PA. Sm, hlm 1

## 2. Landasan pemohon mengajukan *itsbat nikah*

Landasan permohonan *itsbat nikah* diambil dari putusan yang menetapkan putusan ditolak bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam suratnya tertanggal 29 Maret 2006 yang teregistrasi nomor 0007/pdt.p/2006/PA.SM tanggal 29 Maret 2006 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada 15 Desember 1980, para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II jalan Gang Masjid RT. 03 RW. II Kedung Pane yang sekarang ikut wilayah kelurahan Ngaliyan kecamatan Ngaliyan kota Semarang di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mijen kota Semarang.
- b. Bahwa atas pernikahan tersebut oleh KUA kecamatan Mijen para pemohon belum diberi buku kutipan akta nikah dan pada saat ini para pemohon membutuhkan akte tersebut, ternyata pada KUA kecamatan Mijen pernikahan para pemohon tidak tercatat dalam KUKU N (register) sebagaimana surat keterangan dari KUA kecamatan Mijen No.11.33/PW.01/147/2006 tanggal 23 Maret 2006.
- c. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan PPN KUA kecamatan Mijen dengan wali nikah PASIDI (ayah kandung Pemohon II) yang disaksikan oleh:
  - a. DARDI bin RADIMIN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat sekarang di Lahat Sumatra Utara dan alamat pasti tidak tahu.

- b. JUMALI dan PARDI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat di Kedung Pane RT. 01 RW. II kelurahan Ngaliyan kecamatan Ngaliyan kota Semarang.
- d. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun.
- e. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon II (isteri) di Kedung Pane kelurahan Ngaliyan kecamatan Ngaliyan, kota Semarang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama hingga sekarang sudah selama 19 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suam istri serta dikarunia 6 orang anak bernama:
  - 1) SUMARYONO, lahir 16 Mei 1983
  - 2) NUR HASYIM, lahir 20 Desember 1985
  - 3) MUHAMMAD WASITO, lahir 27 Maret 1988
  - 4) TAMINI, lahir 21 April 2000
  - 5) MOHAMMAD ROSYID, lahir 10 Desember 2003.



- g. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.
- h. Bahwa para pemohon membutuhkan penetapan nikah dari pengadilan agama Semarang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus atau membuatkan akte kelahiran terhadap anak-anak permohonan I dan permohonan II.
- i. Bahwa oleh karna para pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga permohonan tidak mampu untuk membayar perkara di pengadilan agama Semarang, oleh karena itu para pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan agama Semarang untuk membebaskan panjar biaya perkara ini dan permohonan mendapatkan surat keterangan dari kepala kelurahan Ngaliyan Nomor 474.2/316/tanggal 17 Maret 2006.
- j. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2) Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para pemohon yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Mijen kota Semarang pada 15 Desember 1980 adalah sah menurut hukum.

3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum (prodeo)

#### SUBSIDER

Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan permohonan I dan permohonan II hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian di bacakan surat permohonan I dan II yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti :

1. Surat berupa surat keterangan dari KUA kecamatan Mijen kota Semarang No.11.33.14/PW.01/147/2006 tanggal 23 Maret 2006/oleh ketua majelis di beri tanda P.
2. Saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. PASIDI bin PARMIN
    - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena sebagai ayah kandung pemohon II.
    - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada tahun 1980 namun tidak dicatatkan di KUA setempat (menikah di bawah tangan).
  - b. JUMALI bin PARDI
    - Bahwa saksi, mengenal Pemohon I dab Pemohon II sebagai orang dekat.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980 namun pada saat itu tidak ada petugas dari KUA setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan selanjutnya tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan.<sup>15</sup>

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini.<sup>16</sup>

### 3. Penyelesaian Perkara Nomor 0007 pdt.P/2006/PA.SM

Setelah pemohon mengajukan permohonannya dalam suratnya tertanggal 29 Maret 2006 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 0007/pdt.P/2006/PA.SM. karena pemohon tidak mampu dan sudah mendapatkan keterangan dari kepala kelurahan Ngaliyan dengan Nomor 474.2/316/06 tanggal 17 Maret 2006, maka pemohon mengajukan kepada bapak ketua Pengadilan Agama Semarang untuk membebaskan panjar biaya perkara. Pemohon terdaftar perkaranya secara cuma-cuma (prodeo) (ps 273 rbg, 237 HIR). Prodeo akan di tolak oleh pengadilan apabila pemohon buka orang yang tidak mampu untuk perkara dasarnya di kenakan biaya (ps 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) rbg).<sup>17</sup> Kemudian

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 5

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VI, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 17.

juru sita pengganti Pengadilan Agama Semarang menyampaikan surat panggilan dengan nomor 0007/ptd.P/2006/PA.SM. kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Semarang memeriksa perkara yang dilangsungkan di ruang sidang gedung Pengadilan Agama Semarang dalam perkara permohonan *itsbat nikah*.

Adapun proses penyelesaian perkara nomor 0007/ptd.P/2006/PA.SM. adalah :

Setelah persidangan di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, para pihak perkara di panggil masuk ke ruang persidangan.

Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya di bacakan surat permohonan pemohon tertanggal 29 Maret 2006 Nomor 0007/ptd.P/2006/PA.SM. yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Kemudian atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan hari ini telah siap dengan saksi-saksi tetapi sebelumnya pemohon mengajukan bukti surat berupa :

Surat keterangan dari KUA kecamatan Mijen kota Semarang No.11.33.14?PW,01/147/2006 tanggal 23 Maret 2006, oleh ketua majelis diberi tanda P.<sup>18</sup>

Selanjutnya oleh ketua majelis dipanggil masuk dan menghadapkan para saksi, yang atas pertanyaan majelis, para saksi menyatakan bersedia menerangkan yang sebenarnya tidak lain yang sebenarnya di bawah sumpah.

---

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang, *op, cit* hlm 2

Setelah para saksi mengucapkan sumpah dan janji menurut tata cara Agama Islam, pemeriksaan dimulai dengan mendengarkan keterangan saksi yang mengaku bernama :

PASIDI bin PARMIN, umur 64 tahun, agama Islam pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di jalan Gang Masjid RT 03 RW II Kedung Pane kelurahan Ngaliyan kecamatan Ngaliyan kota Semarang dan menjawab pertanyaan hakim sebagai berikut :

1. Ada hubungan apa saudara dengan para pemohon.

Jawab: Ya, saya kenal Pemohon I dengan Pemohon II, hubungan saya sebagai ayah kandung Pemohon II.

2. Apa saudara mengetahui bagaimana cara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Jawab: Ya, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1980 namun tidak dicatatkan di KUA setempat (menikah di bawah tangan).<sup>19</sup>

Terhadap keterangan saksi pertama tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan kemudian dilanjutkan mendengar keterangan saksi kedua yang mengaku bernama :

JUMALI bin PARDI, umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan buruh tani, alamat di Kedung Pane RT 01 RW 11 kelurahan Ngaliyan, kecamatan Ngaliyan, kota Semarang dan menjawab pertanyaan hakim sebagai berikut:

- 1) Apa hubungan saudara dengan Pemohon I dan Pemohon II.

Jawab : Ya, saya kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang dekat.

---

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang, *op.cit* hlm 5

2) Apa saudara mengetahui cara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Jawab : a. Ya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980 namun pada saat itu tidak ada petugas dari KUA.

b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah.

3) Apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan?

Jawab: Ya

Terhadap keterangan saksi kedua tersebut pemohon membenarkan/selanjutnya pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan, maka kemudian ketua majelis menyatakan sidang di skors untuk musyawarah majelis dan pemohon diperintahkan untuk keluar ruang persidangan;

Setelah mejelis hakim selesai bermusyawarah lalu persidangan oleh ketua majelis di buka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan.<sup>20</sup>

Kemudian ketua majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi menolak permohonan pemohon I dan pemohon II & membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.0,-(nol rupiah)<sup>21</sup>

**MENETAPKAN**

a. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II: .....

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan bapak hakim Ali Imron *op.cit*

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang *op.cit* hlm 6

- b. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)

4. Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm

Sebagaimana telah tersebut dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pemeriksaan adalah merupakan proses penemuan putusan. Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Agama menggunakan dasar sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, yang berupa hukum-hukum positif yang masih berlaku di Indonesia maupun kitab-kitab fiqh klasik yang biasa digunakan ulama-ulama terdahulu. Adapun pertimbangan hukum putusan hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap nomor 0007/pdt.p/2006/PA.SM adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan pernikahan mereka yang berlangsung pada tanggal 15 Desember 1980 karena pernikahan tersebut tidak dicatat di KUA setempat.

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980, namun pernikahannya tidak dicatatkan di KUA setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa sesuai putusan sela Nomor 0007/pdt.p/2006/PA.SM tanggal 18 April 2006 Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara.<sup>22</sup>

##### 5. Amar Putusan Nomor 0007/pdt.p/2006/PA.Sm

Setelah majelis hakim menyelesaikan perkara *itsbat nikah* dari awal hingga bermusyawarah lalu persidangan oleh ketua majelis hakim dibuka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian pemohon dipanggil masuk keruangan persidangan kemudian majelis hakim membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- a. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II.
- b. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sebesar nol rupiah

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0007/pdt.p/2006/PA.SM., hlm. 5-6.



Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1427 Hijriyah oleh kami Drs.H. SUYUTHIE,SH. Sebagai hakim ketua, Dra.Hj. MULIANY HASYIM,SH.MH. dan Drs.H. ALI IMRON,SH, masing masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MOHAMAD DARDIRI,SH. Sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PERKARA 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm TENTANG DITOLAKNYA PERMOHONAN *ITSBAT NIKAH***

#### **A. Analisis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm**

Pada bab sebelumnya penulis telah kemukakan tentang putusan *itsbat nikah* di pengadilan agama Semarang dengan nomor perkara 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm yang isinya tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah* atas pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Sesuai dengan pembahasan bab ini, penulis akan menganalisa putusan tersebut dalam hal pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan di tolaknya permohonan *itsbat nikah*.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak

lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldeende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.<sup>1</sup>

Pada putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0007/Pdt.P/2006/PA.Sm tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah* atas pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Berkaitan dengan alasan ini dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang, Drs. H. Suyuthie, SH. Sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. A. Mulianny Hasyim, SH.MH dan Drs. H. Ali Imron, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota.<sup>2</sup> Dalam menetapkan menolak permohonan *itsbat nikah* dengan menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara ini antara lain:

1. Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah pemohon I dan pemohon II mohon disahkan pernikahan mereka yang berlangsung pada tanggal 15 Desember 1980 karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat.
2. Menimbang bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1980, namun pernikahannya tidak dicatatkan di KUA setempat.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa pemohon I dan pemohon II menikah setelah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 15.

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0007/Pdt.p/2006/ PA Sm, hlm 4

4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pemohon I dan pemohon II melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.<sup>3</sup>

Dari pertimbangan hukum inilah yang menjadi kunci pokok yang digunakan Pengadilan Agama Semarang dalam menghasilkan putusannya. Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan. Pertimbangan hukum ada sebagai acuan untuk memberikan kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan, penetapan lainnya.

Dalam pertimbangan yang pertama dan kedua sebagaimana karena pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan keterangan para saksi bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1980, namun pernikahannya tidak dicatatkan di KUA setempat, menurut penulis jika dilihat dari berbagai fakta bahwa benar antara para pemohon telah terjadi perkawinan, yang apabila dilihat pada syarat dan rukunnya secara hukum syara' telah terpenuhi. Dalam perkawinan itu menurut pemohon ada pegawai pihak KUA yang hadir dan menurut keterangan pemohon pada saat itu pemohon mendaftarkan nikah masih ikut kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Bahwa atas pernikahan tersebut oleh KUA Kecamatan Mijen para pemohon belum diberi buku kutipan akta nikah dan pada saat ini para pemohon membutuhkan akta tersebut untuk kepentingan berbagai hal, termasuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak. Teryata pada KUA Kecamatan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

Mijen pernikahan para pemohon tidak tercatat dalam KUKU N (register) sebagaimana surat keterangan dari KUA Kecamatan Mijen Nomor 11.3314/PW 01/147/2006 tanggal 13 Maret 2006. Dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, maka dari segi hukum syara' pernikahan antara para pemohon tidak diragukan lagi keabsahannya. Menurut penulis kurang tepat jika karena pernikahan para pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat dijadikan alasan pertimbangan, perkara *itsbat nikah*.

Demikian serentetan fakta yang tidak bisa dibohongi dan terutama kenyataan bahwa mereka para pemohon telah hidup bersama selama kurang lebih 28 tahun, dan telah dikarunia 6 anak.<sup>4</sup> Dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dari segi hukum syara' pernikahan antara para pemohon tidak diragukan lagi keabsahannya. Atas dasar itu para pemohon bermohon kepada pihak yang berwenang untuk mengitsbatkan nikahnya yang telah berlangsung pada tanggal 15 Desember 1980 karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat.<sup>5</sup>

*Itsbat nikah* adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu pegawai pencatat nikah (PPN).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>6</sup> Ahmad Muzaikan dalam skripnya "Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tentang *Itsbat nikah*", Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia perkawinan yang dilakukan seperti itu mempunyai peluang untuk diistbatkan di kemudian hari. Dan justru pernikahan yang diistbatkan itu pernikahan yang tadinya belum sempat atau tidak tercatatkan pada badan yang berwenang. Artinya pernikahan yang diberi peluang untuk diistbatkan di belakang hari yaitu perkawinan yang tadinya belum dianggap sah secara hukum yang berlaku karena ada yang kurang syarat administrasinya, walaupun sudah sah menurut hukum syara'.<sup>7</sup>

Sebagaimana diketahui, ketentuan yang berlaku di Indonesia yang mengatur *itsbat nikah* yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*"<sup>8</sup> Dan dalam ayat (3) diterangkan: "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*
- b. *Hilangnya akta nikah*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*
- d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.*<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 41.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, *op.cit.*, hlm. 137.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Kemudian ayat (4) berbunyi: “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*”<sup>10</sup>

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan *itsbat nikah* yang telah diatur dalam pasal tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, nikah itu dapat dicatatkan dan diitsbatkan alias diakui secara administratif, ini pada satu sisi, dan pada sisi yang lain, dengan adanya pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut berarti telah memberikan peluang bagi nikah-nikah yang tidak tercatat, untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan pernikahan tidak tercatat di KUA, dan pada waktu yang sama merupakan tanggung jawab badan yang berwenang untuk merealisasi terwujudnya peluang itu bagi para pemohon yang ingin mengisi peluang tersebut.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara yang berikutnya adalah telah ditemukan fakta bahwa pemohon I dan pemohon II menikah setelah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif. Menurut Drs. H. Ali Imron, SH. selaku majelis hakim yang memutus perkara ini, hal tersebut jika pernikahan dilakukan setelah undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jika itsbatnya dikabulkan akan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

bertentangan dengan ketentuan yang ada. Karena sejak adanya undang-undang Nomor1 Tahun 1974 pernikahan demi tercapainya tertib hukum maka dilakukan sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan.<sup>11</sup> Menurut penulis pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan kepastian hukum, sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan harus dicatatkan, namun disisi yang lain demi suatu perlindungan hukum karena pernikahan setelah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berarti permohonan itsbatnya tidak dikabulkan.

Menurut Drs. Abdullah, SH.MH. selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang mengatakan penetapan *itsbat nikah* tidak hanya berdasarkan karena pernikahan sebelum undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun dapat disahkan berdasarkan KHI, juga kepentingan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan, guna menampung perkembangan yang terus bergerak.<sup>12</sup> Memang benar jika pernikahan sebelum undang-undang Nomor1 Tahun 1974 permohonan itsbatnya dikabulkan karena sebelum adanya undang-undang ini perkawinan belum diatur dalam undang-undang, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka penetapan nikah karena pernikahan setelah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sangat tepat jika penetapan nikah (istbat nikah) tidak bergantung pada pernikahan sebelum undang-undang Nomor1 Tahun 1974 atau sesudahnya, namun sesuai dengan para pemohon berdasarkan kemaslahatan. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat akan pengertian maslahat, kita harus melihat dari

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Drs. H. Ali Imron, SH. hakim Pengadilan Agama Semarang.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Drs. Abdullah, SH.MH. hakim Pengadilan Agama Semarang.



berbagai sisi dan sudut pandang. Maslahat adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu.<sup>13</sup>

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM. yang terakhir adalah bahwa berdasarkan fakta, pemohon I dan pemohon II melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 terdapat 2 ayat, ayat (1) berbunyi: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*” Dan ayat (2) berbunyi: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”<sup>14</sup> Menurut penulis kurang tepat jika pernikahan pemohon dikatakan tidak sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika melihat pasal 2 ayat 1 pernikahan pemohon sudah sah menurut agama dan kepercayaannya. Namun pada ayat yang ke (2) pemohon tidak bisa membuktikan dengan bukti yang otentik bahwa pernikahannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demi suatu ketertipan dan kepastian hukum maka setiap perkawinan harus dilakukan sesuai pasal 2 ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan kunci pokok digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan ditolaknya permohonan *itsbat nikah* ini, majelis hakim hanya

---

<sup>13</sup> Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barud (Eds), *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2002), hlm. 19.

<sup>14</sup> Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *op.cit.*, hlm. 2.

berdasarkan pada undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Padahal dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak ada pasal yang membahas *itsbat nikah*, namun *itsbat nikah* diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. sejak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya telah diatur tata cara melakukan perkawinan, maka harus dipenuhinya persyaratan administrasinya, baru dilangsungkan akad nikah, yang kemudian baru dikeluarkan bukti adanya pernikahan. Berkaitan dengan perkara ini menurut majelis hakim bahwa pernikahan pemohon tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak permohonan *itsbatnya*.<sup>15</sup>

Demikian beberapa alasan yang dikemukakan oleh majelis hakim. Alasan-alasan tersebut terkesan mengandung kebenaran, terutama jika hanya berpatokan pada peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974, khususnya pasal 2 ayat (2) tanpa menelusuri tujuan penerapan suatu rumusan hukum dari segi manfaat dan madharatnya, atau hanya berpegang pada peraturan tersebut tanpa mengaitkan dengan peraturan yang lain yang berkaitan dengan itu. Pandangan yang sempit dan kaku seperti itu dapat dipastikan akan mengakibatkan penerapan hukum yang kaku pula, dan menurut sifatnya bisa berakibat negatif bagi diri pihak-pihak tertentu.

Pokok permasalahan dalam perkara nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM, terlepas dari tepat dan kuang tepatnya pertimbangan dan dasar hukum hakim yang digunakan dalam penetapan perkara ii, jika melihat alasan para pemohon yang mengajukan permohonan *itsbat nikahnya* guna pembuatan akta kelahiran

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang, *op.cit.*, hlm. 6.

anak, sudah jelas bahwa itu akan mendatangkan kemaslahatan.<sup>16</sup> Adanya *itsbat nikah* ini para pihak yang terlibat dalam pernikahan akan terlindungi oleh hukum, karena telah melakukan tindakan hukum dan akan mendapatkan penegakan hukum

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”<sup>17</sup> Ada pula ketentuan yang mengatur tentang pencatatan nikah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1): “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*”<sup>18</sup> Sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi. Akta nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta nikah ini akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan jika terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada kantor catatan sipil.

Dalam hal pencatatan perkawinan, dalam al-Qur'an tidak dibicarakan secara langsung, namun dalam ayat mudayanah (al-Baqarah, 2:282)

---

<sup>16</sup> Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barud, *op.cit.*, hlm. 19-20.

<sup>17</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2002), hlm. 2.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), hlm. 137.

mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan, menjadi salah satu rukun,<sup>19</sup> lebih jelasnya akan dikutip ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ... (البقرة : 282)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur... (QS. Al-Baqarah: 282)*<sup>20</sup>

Dalam hal bermu'amalah saja Allah memerintahkan untuk mencatatkannya, apalagi peristiwa perkawinan yang begitu penting, bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dengan melihat kemaslahatan. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet.VI, hlm. 118.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit al-Jumanatul Ali Art (J-Art), 2004), hlm. 59

Penetapan nikah (*itsbat nikah*) menurut hemat penulis dalam istilah ushul fiqh, kebijakan ini menggunakan metode *maslahah mursalah*, yakni suatu ketentuan yang tidak diatur dalam agama (fiqh) tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.<sup>21</sup> Bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga, sejalan dengan prinsip:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.*<sup>22</sup>

Dengan memperhatikan ayat 282 surat al-Baqarah dapat dilakukan analogi (qiyas) yaitu mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya. Illat hukumnya yaitu dampak negatif yang ditimbulkan. Dapat ditegaskan bahwa pencatatan, penetapan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau *maslahat mursalah*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), Cet.I, hlm. 116.

<sup>22</sup> Moh Adib Bisri, *Terjemahan al Fara Idul Bahiyyah*, Kudus, Menara Kudus, 1977, hlm 24.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 121.

## **B. Analisis Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM Relevansinya Terhadap Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan**

### **1. Analisis Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM Relevansinya Terhadap Asas Keadilan**

Dalam bab sebelumnya penulis telah kemukakan putusan perkara nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM relevansinya terhadap asa keadilan. Asas keadilan merupakan prinsip keadilan yang wajib dilakukan oleh para penegak keadilan. Menegakkan keadilan itu adalah prinsip, walaupun ada tekanan dari manapun dan dalam kondisi bagaimanapun keadilan itu harus ditegakkan.<sup>24</sup>

Hakim wajib memberi rasa aman dan pengayoman kepada pencari keadilan, pendekatan secara manusiawi, yuridis, sosiologis, psikologis, dan filosofis yang religius kepada para pihak sehingga putusan hakim akan lebih menyentuh kepada rasa keadilan yang didambakan.<sup>25</sup>

Bagi hakim yang beragama Islam, dalam memutus suatu perkara tidak sekali-kali dibenarkan menyimpang dari syariat Islam. Islam dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengadili suatu perkara secara adil dan harus sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulullah, karena kewenangan dari Allah, itulah tanda ketaatan manusia kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Indonesia-Hill.Co., 1985), hlm. 17.

<sup>25</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 34.

<sup>26</sup> A. Rahman I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo 2002), Cet. 1, hlm. 8.

Ditegaskan pula bahwa agar pengadilan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu memberikan putusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Maka tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan atau pengaruh dari luar yang menyebabkan para hakim tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 42:

... وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة : 42)

Artinya: ... dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Maidah:42)<sup>27</sup>

Perintah untuk memutuskan suatu perkara secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur dan sebagainya. Pada dasarnya tidak hanya wajib oleh hukum positif saja, tetapi juga diwajibkan oleh Islam, seorang hakim yang telah memutus suatu perkara dengan adil belum tentu adil menurut orang lain. Begitu juga dengan kebenaran menurutnya belum tentu benar menurut orang lain, keadilan dan kebenaran yang dijadikan dasar hukum negara belum tentu sesuai dengan keadilan dan kebenaran sesuai dengan syariat Islam. walaupun keadilan dan kebenaran yang menjadi dasar keputusan hakim itu sesuai dengan hukum Islam, para hakim pun belum tentu mampu untuk melaksanakannya. Keadilan manusia itu bersifat

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 116.

subjektif dan selamanya akan subjektif, apalagi dasar kebenaran yang dijadikan pedoman para hakim tidak sedikit yang bertentangan dengan syariat agama (tergantung kepada pribadinya).<sup>28</sup>

Dalam putusan perkara nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah* yang tidak dicatatkan di KUA relevansinya terhadap asas keadilan, menurut penulis hakim dalam menjatuhkan putusan ini tidak memenuhi asa keadilan. Hakim memutus perkara ini hanya berdasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, tanpa melihat seberapa pentingnya kebutuhan pemohon yang jelas mendatangkan kemaslahan. Dan dalam ketentuan yang berlaku dalam negara Indonesia ini bahwa permohonan *itsbat nikah* yang seperti ini bisa dikabulkan, sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Asas keadilan dalam putusan ini seharusnya mendapatkan perhatian penuh, hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap keputusan hakim tidak menambah keresahan dalam kehidupan masyarakat khususnya para pencari keadilan.<sup>29</sup>

Mengingat sangat mendasarnya masalah keadilan bagi kehidupan manusia, maka secara sadar kita rumuskan hakekat peradilan dan posisi hakim dalam pasal 24 UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 menegaskan bahwa *kekuasaan kehakiman*

---

<sup>28</sup> Chabib Rasyid, "Hakim Diantara Profesi dan Kesempatan Beramal Sholeh", dalam Bulletin Berkala Hukum dan Peradilan Nomor 6 Tahun 1996/1997, hlm. 26.

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet.3, hlm. 300.



*adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.*<sup>30</sup> selanjutnya pasal 4 ayat 3 undang-undang nomor 4 tahun 2004 menegaskan pula bahwa *segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.*<sup>31</sup>

Keputusan yang adil akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan dan memberi jaminan hak dan harkat setiap insan pada berbagai aturan norma masyarakat sesuai dengan kepentingan seluruh anggota masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan perkara *itsbat nikah* ini, tentunya akan lebih sesuai dengan keadilan jika *itsbat* dilakukan dalam rangka menjaga kelangsungan perkawinan mereka yang mana didalamnya terdapat masa depan anak yang benar-benar membutuhkan penetapan nikah orang tuanya yang pernikahannya belum mempunyai kekuatan hukum hitam di atas putih.

## 2. Analisis Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM Relevansinya Terhadap Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas penting untuk tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai tujuan dari penyelenggaraan dan penegakan hukum, sehingga kepastian hukum harus senantiasa dapat dijamin keberadaannya dalam setiap penyelenggaraan

---

<sup>30</sup> Mohammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 70.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 99.

hukum. Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan wajib mengadilinya. *Sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat* (pasal 27 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman).<sup>32</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari para pihak yang berperkara, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Setelah majelis hakim menemukan peristiwa dan fakta secara obyektif, maka majelis hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 189 ayat (1) R.B9).<sup>33</sup>

Berkaitan dengan putusan perkara nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM relevansinya terhadap asas kepastian hukum, menurut penulis majelis hakim dalam memutus perkara ini hanya menggunakan dasar undang-

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>33</sup> Kwantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata, RBG/HIR*, Jakarta, Balai Pustaka.

undang nomor 1 tahun 1974. Bahwa sejak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya telah diatur tata cara melakukan perkawinan, maka harus terpenuhinya persyaratan administrasinya, baru dilangsungkan akad nikah, yang kemudian baru dikeluarkan bukti adanya pernikahan.<sup>34</sup> Majelis hakim yang memutus perkara ini menilai bahwa alasan pemohon mengajukan *itsbat nikah* tidak mempunyai sandaran hukum, maka permohonannya ditolak.<sup>35</sup> Putusan perkara *itsbat* ini sesuai dengan kepastian hukum undang-undang nomor 1 tahun 1974, sejak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka tiap perkawinan harus dicatatkan dan mempunyai bukti yang otentik.

### 3. Analisis Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM Relevansinya Terhadap Asas Kemanfaatan

Agar suatu putusan hakim mencapai upaya kemanfaatan hukum maka dari segala aspek benar-benar perlu dipertimbangkan demi terciptanya hukum yang bermanfaat dan tercapainya suatu keadilan hukum, asas kemanfaatan dalam hal ini adalah kemanfaatan hukum, kegunaan hukum. Asas kemanfaatan ada karena kemaslahatan, untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat akan pengertian maslahat, harus melihat dari berbagai sisi dan sudut pandang.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Martiman Prodjohamodjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Abadi, 2004), hlm. 45-47.

<sup>35</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang, *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>36</sup> Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barud, *op.cit.*

Sebagai permulaan akan lebih baik jika melihat pengertian kemaslahatan secara sederhana dan universal, yaitu dengan mengatakan maslahat adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu.<sup>37</sup>

Selanjutnya dilihat dari sisi lain dari maslahat yaitu mencegah mafsadat, tidak mungkin memelihara kemaslahatan dan kemudian melupakan eksesnya yaitu mafsadat.

Dilihat dari sisi ketiga, ditemukan bahwa kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi mereka sangat beragam bentuk dan coraknya. Menurut pembagian para ulama kemaslahatan ada 5 macam yaitu:

- a. Kemaslahatan agama
- b. Kemaslahatan jiwa
- c. Kemaslahatan kehormatan
- d. Kemaslahatan terhadap akal
- e. Kemaslahatan terhadap harta benda.<sup>38</sup>

Dapat pula kita kategorikan dalam bentuk lain yaitu kemaslahatan material dan kemaslahatan spiritual. Kemaslahatan material meliputi badan dan harta serta apa yang melayani keduanya. Sedangkan

---

<sup>37</sup> Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 200.

<sup>38</sup> Mahmudi Asy'ari, "Problematika Pencatatan Perkawinan Islam di Indonesia", dalam JAUHAR Vol. 6 Nomor1 Juni 2005, hlm. 74.

kemaslahatan spiritual meliputi kemaslahatan rohani, akal, jiwa, dan moral.<sup>39</sup>

Dilihat dari sisi keempat, ditemukan bahwa maslahat dan mafsadat mempunyai tingkatan yang berbeda secara kualitas dan kuantitas. Dalam hal ini para ulama membagi kemaslahatan pada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap. Setiap bagian memiliki tingkatan tersendiri dan tidak terbatas. Jika kita mengkaji suatu kemaslahatan atau beberapa kemaslahatan maka tidak boleh menghilangkan kemaslahatan yang lain, apalagi yang memiliki nilai dan kualitas lebih.<sup>40</sup>

Kemudian jika dilihat dari sudut waktu yang panjang, kita dapatkan bahwa kemaslahatan karena perkembangan zaman dapat berubah menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya, begitu pula suatu kemaslahatan yang dianggap remeh pada kurun waktu yang pendek, namun menjadi penting dalam jangka panjang atau sebaliknya.<sup>41</sup>

Kemaslahatan dipandang dari sisi kemaslahatan dan kekhususan, bisa saja dianggap kemaslahatan bagi kelompok elit dan khusus dan menjadi mafsadat bagi orang-orang awam. Kemaslahatan hakiki adalah kemaslahatan yang membawa manfaat dan kebaikan yang dapat dirasakan oleh kelompok elit dan umum secara bersamaan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ahmad al Raysuni, *op.cit.*, hlm. 19-20.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

Ada pula bentuk kemaslahatan yang diyakini dan dianggap benar, namun dalam perjalanannya menyingkirkan kemaslahatan lain, atau malah terjerumus dalam mafsadat begitu juga dengan kemanfaatan, kapan sesuatu dianggap bermanfaat dan kapan sesuatu dianggap sebagai mudarat. Dalam kondisi ini, harus meletakkan pada proporsinya masing-masing, kemudian dianalisis dari segala sudut pandang yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya akan hadir dihadapkan kita mana yang lebih baik didahulukan dan diakhirkan.

Sebagaimana dalam perkara ini yaitu putusan perkara nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM relevansinya terhadap asas kemanfaatan menurut penulis putusan ini belum relevan dengan asas kemanfaatan, karena para pemohon yang bermohon tidak terpenuhi haknya sebagai warga negara Indonesia yang membutuhkan perlindungan hukum guna melangsungkan kehidupannya ke depan.

Seharusnya sebagai penegak keadilan yang setiap putusannya agar membawa manfaat bagi para pencari keadilan, hakim wajib memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pencari keadilan.<sup>43</sup> Pendekatan secara manusiawi, sosiologi, psikologis dan fisiologis yang religius, disamping pendekatan juridis dapat memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pihak menyentuh kepada rasa keadilan dan kemanfaatan yang didambakan oleh para pihak pencari keadilan.

---

<sup>43</sup> Mukti Arto, *op.cit.*, hlm. 34.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan studi kasus tentang perkara permohonan *itsbat nikah* yang ditetapkan ditolak permohonannya di Pengadilan Agama Semarang, dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah* atas pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, hanya menitikberatkan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini dirasa kurang tepat karena dalam undang-undang nomor 1974 tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang *itsbat nikah*. Namun *itsbat nikah* (penetapan nikah) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam pasal 7. Jika dilihat dari berbagai faktor para pemohon yang mengajukan permohonan *itsbatnya* berhak untuk mendapatkan penetapan nikah atau permohonan *itsbatnya* dikabulkan. Alangkah baiknya apabila setiap perkara pemohon *itsbat nikah* di Pengadilan Agama disertai dengan dicantumkan dasar hukum Islam dengan putusan, sehingga dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara *itsbat nikah* lebih kuat dan terarah.

2. Relevansi putusan perkara nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM di Pengadilan Agama Semarang tentang ditolaknya permohonan *itsbat nikah* terhadap asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam menetapkan perkara ini majelis hakim selaku penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak bisa memenuhi tiga asas yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan sekaligus secara seimbang. Majelis hakim memutus perkara ini belum memenuhi asas keadilan, dalam menetapkan perkara hanya berdasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tanpa menggunakan pertimbangan hukum islam. Relevansi terhadap asas kemanfaatan juga belum memenuhi, karena para pemohon tidak terpenuhi haknya sebagai warga Negara Indonesia yang membutuhkan perlindungan hukum guna melangsungkan kehidupan kedepan bersama seluruh keluarganya. Namun putusan perkara ini hanya relevan dengan asas kepastian hukum undang-undang nomor 1 tahun 1974, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan harus dicatatkan agar mempunyai bukti yang otentik. Tiap-tiap pernikahan yang tidak dicatatkan sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.



## **B. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

1. Para hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam mengambil dasar hukum untuk perkara yang sama dengan perkara nomor 0007/Pdt.p/2006/PA.SM, hendaknya tidak hanya menitikberatkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974. Alangkah lebih baik kalau dasar hukum tersebut dicantumkan secara jelas, tegas dan terukur. Karena sebuah putusan pada saat ini, mungkin akan dijadikan tolak ukur hakim-hakim di kemudian hari, dan juga akan menjadi bahan kajian bagi para pelajar. Sehingga kepada hakim Pengadilan Agama saya menyarankan agar dalam menjatuhkan sebuah putusan itu hendaknya mengambil dasar hukum dari hukum positif dan hukum Islam, agar putusan yang dihasilkan merupakan suatu putusan yang jelas, tegas, adil dan benar.
2. Kepada para pegawai pencatat nikah, hendaknya lebih berhati-hati dalam melaksanakan pencatatan nikah, agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan para pihak.
3. Kepada seluruh para pembaca karya tulis ilmiah ini, perlu kiranya diperhatikan demi terlindunginya suatu ikatan perkawinan dan kepastian hukum maka pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan bukti yang otentik guna terciptanya perlindungan hukum.

### C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka karya tulis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran-saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, kepada semua pihak yang telah membantu, terlebih kepada Bapak dosen pembimbing. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan dan ridha-Nya. *Amin ya rabbal alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- al-Raysuni, Ahmad dan Barud, Muhammad Jamal (Eds), *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2002)
- Arifin, Moh, *Itsbat Nikah Solusi Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan dl Usaha Terciptanya Perlindungan Hukum*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 2, 2001)
- Asy'ari, Mahmudi, "Problematika Pencatatan Perkawinan Islam di Indonesia", dalam JAUHAR Vol. 6 Nomor1 Juni 2005.
- Ashofa Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, cet ke-4, 2004
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bisri, Moh Adib, *Terjemahan al Fara Idul Bahiyyah*, Kudus, Menara Kudus, 1977. Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Indonesia-Hill.Co., 1985)
- Bisri, Raikhan Rasyid, *Hukum Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2001.
- Bisyri, Mohammad Hasan "Problematika Nikah Sirri Dalam Negara Hukum", Dalam Jurnal Hukum Islam, Jurusan Syari'ah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
No. 1 Tahun 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV.  
Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-Art), 2004).

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen  
Agama RI, 1999/2000)

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,  
(Jakarta: Prenada Media, 2004)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta : Offset, 2000).

Hamdani, Harjo, “Sambutan Hangat untuk UU No.3/2006” dalam *Justisia*,  
Edisi 30, Tahun XV 2006.

I.Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta:  
Raja Grafindo, Cet. 1, 2002),

Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*,  
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 2005)

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, Cet.I,  
1994),

Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat IAIN  
Walisongo, *Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang  
Perkawinan di Kalangan Masyarakat Islam Kabupaten  
Jepara*, Semarang: IAIN Walisongo, 1982.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan  
Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, Cet.3, 2005)

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:  
Liberty, 2002).

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake  
Sarasin, 1989)

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz II, (Lebanon : Dar al-Kutub  
Alamiyah, t.th)

Muzaikan, Ahmad dalam skripnya “Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi  
Hukum Islam tentang Itsbat Nikah”, Perpustakaan Fakultas  
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).
- Partanto, Pius A. Al-Barry, M. Dahlan *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994).
- Prodjohamodjojo, Mr. Martiman, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Abadi, 2004)
- Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 0007/pdt.p/2006/PA. Sm.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IND-HILL, CO, 1985)
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: IND-HILL, CO, 1991).
- Rasyid, Chabib, “Hakim Diantara Profesi dan Kesempatan Beramal Sholeh”, dalam *Bulletin Berkala Hukum dan Peradilan Nomor 6 Tahun 1996/1997*.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2003)
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ahmad, Rais, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, , cet. ke-1, 2006)
- Sabiq, Sayid, Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib, *Fiqh Sunah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1997) Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Struktur organisasi pengadilan Agama Semarang
- Suma, Mohammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Tim Peneliti, “Studi Kasus Kawin Sirri dan Poligami di kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1994
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2002).
- Undang-undang RI Tentang Peradilan, Citra Wacana, 2008

Wawancara dengan Drs. Abdullah, SH.MH. hakim Pengadilan Agama Semarang.

Wawancara dengan Drs. H. Ali Imron, SH. hakim Pengadilan Agama Semarang.

Zain, Muhammad dan Shodiq, Mukhtar Ali, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta, Graha Cipta, Cet.I, 2005.